

**ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN PADA ERA
OTONOMI DAERAH (PERIODE 2001-2008)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Ekonomi Pembangunan**



Oleh :

RAHDUTA PUTRI SARI DEWI
0611010089 /FE /IESP

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2010**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat serta hidayah-Nya yang telah dilimpahkan sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu kewajiban mahasiswa untuk memenuhi tugas dan syarat akhir akademis di Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Dalam penelitian skripsi ini peneliti mengambil judul **“Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan Pada Era Otonomi Daerah (Periode 2001-2008)”**.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang ada.

Atas terselesaikannya skripsi ini, peneliti menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Teguh Sudarto,MP, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr.Dhani Ichsanuddin Nur,SE,MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs.Ec.Marseto D.S,Msi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Drs.Ec. M. Usman Ali,M.Kes, selaku Dosen Wali yang telah meluangkan waktu dalam membimbing dan mendampingi peneliti selama menempuh pendidikan didalam perkuliahan.

5. Ibu Ir.Hamidah Hendrarini, Msi selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam membimbing dan mendampingi peneliti selama melakukan penelitian ini.
6. Segenap staf pengajar dan staf kantor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuannya dan pelayanan akademik bagi peneliti.
7. Ayah dan Bunda tercinta yang telah sabar mendidik dan membesarkan peneliti dengan penuh kasih sayang baik moral, material, maupun spiritual, dan juga untuk kakak dan adik peneliti, semua perhatianmu tidak akan pernah peneliti lupakan.

Akhir kata yang dapat terucapkan semoga penyusunan skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang membutuhkan, semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal.

Wassallamualaikum Wr.Wb.

Surabaya, Juni 2010

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAKSI	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian-penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori	14
2.2.1 Fungsi Pemerintah Dalam Perekonomian	14
2.2.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	19
2.2.3 Desentralisasi	19
2.2.3.1 Tujuan Desentralisasi	22

2.2.3.2	Kelebihan dan Kelemahan Desentralisasi	22
2.2.4	Dekonsentrasi	24
2.2.5	Tugas Pembantuan	25
2.2.6	Otonomi Daerah	25
2.2.6.1	Pengertian Otonomi Daerah	25
2.2.6.2	Prinsip Dasar dan Tujuan Otonomi Daerah	27
2.2.6.3	Perkembangan Otonomi Daerah	28
2.2.6.3.1	Masa Reformasi	28
2.2.7	Sumber-sumber Penerimaan Daerah.....	35
2.2.7.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35
2.2.7.2	Dana Perimbangan	43
2.2.7.3	Pinjaman Daerah	46
2.2.7.4	Lain-lain Pendapatan yang Sah	48
2.2.8	Keuangan Daerah	48
2.2.8.1	Pengelolaan Keuangan Daerah	49
2.3	Kerangka Pikir	51
2.4	Hipotesis	59

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	60
3.2	Jenis dan Sumber Data	62
3.2.1	Jenis Data	62

3.2.2	Sumber Data	63
3.3	Teknik Pengumpulan Data	63
3.4	Teknik Analisis	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Deskripsi Obyek Penelitian	68
4.1.1	Kondisi Umum Kabupaten Pasuruan	68
4.1.1.1	Letak Geografis	68
4.1.1.2	Penduduk	69
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian	73
4.3	Analisis dan Pengujian Hipotesa	82
4.3.1	Uji Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal	82
4.3.2	Uji Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	86
4.3.3	Uji Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)	92
4.4	Pembahasan	94

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	97
5.2	Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1	Perbedaan UU No.22 Tahun 1999 dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	33
2.2	Pola Hubungan Keuangan dan Tingkat Kemandirian Daerah	57
4.1	Luas dan Wilayah Administratif Kabupaten Pasuruan	69
4.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2001- 2008	70
4.3	Kondisi Penduduk Kabupaten Pasuruan Menurut Registrasi Penduduk Tahun 2008	72
4.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2001-2008	77
4.5	Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2001-2008	78
4.6	Komposisi Total Penerimaan Daerah (TPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2001-2008	81
4.7	Rasio PAD terhadap TPD, Rasio BHPBP terhadap TPD, Rasio SB terhadap TPD, dan Rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Pasuruan Tahun 2001-2008	84
4.8	Rata-rata Rasio PAD terhadap TPD Ditambah Rasio BHPBP terhadap TPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2001-2008	85
4.9	Rasio PAD terhadap PTD dan Rasio PAD terhadap PRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2001-2008	88

4.10	Rasio PAD ditambah BHPBP terhadap PTD dan Rasio PAD ditambah BHPBP terhadap PRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2001-2008	89
4.11	Rasio PAD terhadap PTD, Rasio PAD terhadap PRD, Rasio PAD+BHPBP terhadap PTD, Rasio PAD+BHPBP terhadap PRD, dan Rasio Tingkat Kemandirian Daerah (TKD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2001-2008	91
4.12	Perubahan PAD dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Pasuruan Tahun 2001-2008	93

DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar Kerangka Pikir	58
----	-----------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001-2008.
- Lampiran 2 : Luas dan Wilayah Administratif Kabupaten Pasuruan.
- Lampiran 3 : Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2001-2008.
- Lampiran 4 : Kondisi Penduduk Kabupaten Pasuruan Menurut Registrasi Penduduk Tahun 2008.
- Lampiran 5 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2001-2008.
- Lampiran 6 : Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001-2008.
- Lampiran 7 : Komposisi Total Penerimaan Daerah (TPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2001-2008.
- Lampiran 8 : Perhitungan Rasio PAD Terhadap TPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2001-2008.
- Lampiran 9 : Perhitungan Rasio BHPBP Terhadap TPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2001-2008.
- Lampiran 10 : Perhitungan Rasio SB Terhadap TPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2001-2008.
- Lampiran 11 : Perhitungan Rata-rata Rasio PAD Terhadap TPD Ditambah Rasio BHPBP Terhadap TPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2001-2008.

Lampiran 12 : Perhitungan Rasio PAD Terhadap PTD Kabupaten Pasuruan

Tahun 2001-2008.

Lampiran 13 : Perhitungan Rasio PAD Terhadap PRD Kabupaten Pasuruan

Tahun 2001-2008.

Lampiran 14 : Perhitungan Rasio PAD Ditambah BHPBP Terhadap PTD

Kabupaten Pasuruan Tahun 2001-2008.

Lampiran 15 : Perhitungan Rasio PAD Ditambah BHPBP Terhadap PRD

Kabupaten Pasuruan Tahun 2001-2008.

Lampiran 16 : Perhitungan Rasio Tingkat Kemnadirian Daerah (TKD)

Kabupaten Pasuruan Tahun 2001-2008.

Lampiran 17 : Perhitungan Perubahan PAD ADHB Kabupaten Pasuruan Tahun

2001-2008.

Lampiran 18 : Perhitungan Perubahan PDRB ADHB Terhadap Kabupaten

Pasuruan Tahun 2001-2008.

ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN PADA ERA OTONOMI DAERAH (PERIODE 2001-2008)

Oleh :

RAHDUTA PUTRI SARI DEWI

ABSTRAKSI

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), peranan PAD terhadap Pengeluaran Total Daerah (PTD) dan Pengeluaran Rutin Daerah (PRD), dan Elastisitas PAD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pasuruan periode 2001-2008. Model analisis yang digunakan adalah model derajat desentralisasi fiskal, tingkat kemandirian daerah, dan elastisitas PAD.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model derajat desentralisasi fiskal hasilnya rendah sekali yaitu 8,11 % dan mempunyai pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang bersifat instruktif. Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Pasuruan termasuk dalam kategori rendah sekali yaitu 18,01 % dan mempunyai pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang bersifat instruktif. Koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB sebesar 0,81 % dinyatakan inelastis ($e < 1$) artinya perubahan PAD tidak peka terhadap perubahan PDRB yang terjadi.

Kata kunci : otonomi daerah, derajat desentralisasi fiskal, tingkat kemandirian daerah, elastisitas PAD.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan reformasi di segala bidang yang didukung oleh sebagian masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan di daerah akhir-akhir ini, membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu unsur reformasi total tersebut adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah (Pemerintah Daerah), yang di kenal dengan kebijakan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Alasan-alasan yang menyebabkan lahirnya tuntutan tersebut adalah; *pertama*, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Hal tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah

seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, otonomi daerah merupakan jawaban untuk memasuki *era new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang. Di era seperti ini, dimana *globalization cascade* sudah semakin meluas, pemerintah akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti pada perdagangan internasional, informasi, serta transaksi keuangan (Mardiasmo, 2002:3-4).

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah digulirkan pada 1 Januari 2001. Adanya Undang-Undang tersebut telah mengakibatkan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintah dari paradigma sentralistis ke arah desentralisasi yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata kepada daerah. Perubahan paradigma juga merupakan kesempatan yang penting bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan lokal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal.

Banyak harapan yang dimungkinkan dari penerapan otonomi daerah, seiring dengan itu tidak sedikit pula masalah, tantangan, dan kendala yang dihadapi daerah. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Kebijakan otonomi daerah ini memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, tiap-tiap pemerintah kabupaten/kota mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 (Hermansyah, 2007:2).

Pengalihan pembiayaan atau desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003: 83).

Dalam desentralisasi fiskal, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting. Dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara pemerintah pusat dan daerah (*intergovernmental fiscal relations system*), sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang pemerintahan.

Ada perbedaan sudut pandang di dalam menyikapi masalah dana perimbangan ini. Di satu sisi, adanya dana perimbangan dalam otonomi

daerah merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah pusat atas berjalannya proses otonomi daerah. Hal ini juga sebagai wujud bahwa walaupun sistem yang diterapkan adalah sistem otonomi daerah, akan tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun di sisi yang lain, adanya dana perimbangan yang terlalu besar akan menimbulkan persepsi bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal dan akan sampai pada kesimpulan akhir bahwa otonomi daerah tidak efektif untuk dilaksanakan. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hampir di semua daerah prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD), relatif lebih kecil, sekitar 25% dari Total Penerimaan Daerah (TPD). Pada umumnya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari Total Penerimaan Daerah (TPD). Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Selama ini sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh pusat (Yani, 2002: 3).

Kiranya sangat disadari arti pentingnya faktor kemampuan keuangan dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga mendapatkan

perhatian yang besar dan sungguh-sungguh baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota itu sendiri maupun oleh Pemerintah Daerah Provinsi di seluruh Indonesia. Berkaitan dengan ciri kemampuan suatu daerah dalam berotonomi seperti yang diuraikan di atas maka diharapkan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin kecil dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Jawa Timur yang juga menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya sebagaimana yang dilaksanakan oleh daerah lain baik di Jawa Timur maupun di Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk mengidentifikasi jenis dan besar penerimaan yang diterima serta belanja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan agar perencanaan keuangan daerahnya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Total Penerimaan Daerah (TPD) yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan tahun 2001 sampai dengan tahun 2003, secara garis besar terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah, serta pinjaman pemerintah

daerah. Sedangkan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 seiring dengan perubahan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), secara garis besar Total Penerimaan Daerah (TPD) terdiri dari total pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah ditambah dengan penerimaan pembiayaan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan dari tahun 2001 sampai dengan 2003. Sedangkan pada Tahun 2004 mengalami penurunan sebesar Rp 61.382,59 juta. Kemudian pada tahun 2005 sampai dengan 2008 kembali mengalami peningkatan. Dana perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana perimbangan dari provinsi juga mengalami peningkatan dari tahun 2001 sampai dengan 2003. Sedangkan pada tahun 2004 dan 2005 mengalami penurunan menjadi Rp 467.324,32 juta dan Rp 463.836,23 juta. Kemudian pada tahun 2006 sampai dengan 2008 kembali mengalami peningkatan. Total Penerimaan Daerah (TPD) Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan dari tahun 2001 sampai dengan 2003. Pada tahun 2004 dan 2005 mengalami penurunan sebesar Rp 685.544,39 juta dan Rp 661.693,97 juta. Total Penerimaan Daerah (TPD) kembali meningkat pada tahun 2006 sampai dengan 2008.

Dapat dicermati bahwa selama delapan tahun periode pengamatan pada laporan penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan yang terdiri dari Bagi

Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Total Penerimaan Daerah (TPD) pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 mengalami fluktuasi. Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuasi perlu diketahui lebih lanjut seberapa besar kemampuan keuangan Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan otonomi daerah.

Oleh karena itu, perlu diketahui pula besarnya Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), sumbangan dan bantuan, total penerimaan, serta pinjaman daerah yang merupakan komponen dari alat ukur untuk mengetahui besarnya kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi yang berupa derajat desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian keuangan. Kinerja keuangan daerah selain dapat dilihat dari derajat desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian keuangan, juga dapat dilihat dari elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan uraian di atas, untuk dapat mengetahui kemampuan keuangan Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan otonomi daerah selama tahun 2001 sampai dengan 2008, oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada Era Otonomi Daerah (Periode 2001-2008)”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Seberapa besar derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Pasuruan pada era otonomi daerah?
2. Seberapa besar tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pasuruan pada era otonomi daerah?
3. Seberapa besar elastisitas PAD terhadap PDRB Kabupaten Pasuruan pada era otonomi daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui :

1. Seberapa besar derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Pasuruan pada era otonomi daerah.
2. Seberapa besar tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pasuruan pada era otonomi daerah.
3. Seberapa besar elastisitas PAD terhadap PDRB Kabupaten Pasuruan pada era otonomi daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini antara lain :

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan Ilmu Ekonomi, khususnya Ilmu Ekonomi Publik.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi gambaran dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan otonomi daerah yang lebih baik.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi serta bahan perbandingan bagi peneliti lain dalam penelaahan lebih lanjut.